

NAMA ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
INDIKATOR KINERJA UTAMA : TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang sehat	1	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	0,72	Persen	Formulasi Perhitungan : Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU dibagi Jumlah unit rumah kab/kota dikali 100	PDAM, Data Pamsimas, Dinas Kesehatan (Non Perpipaan),LPPD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		2	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	79,30	Persen	Formulasi Perhitungan : Luas kumuh yang ditangani dibagi luas wilayah kumuh dikali 100	Melalui Pendataan RP3KP Tahun 2019	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PERUMAHAN
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
MAMAN SETIAWAN, S.T.,M.T
 PEMBINA TINGKAT I



PENJELASAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD (PERKIM)

1) Indikator Kinerja **persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak** pada tahun 2022 terealisasi sebesar 1,31 persen. Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,72 persen dengan persentase capaian sebesar 181,94 persen. Indikator ini merupakan indikator kinerja utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai merupakan faktor penting yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan hunian yang layak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 dinyatakan bahwa perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Sedangkan pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman. Adapun fasilitas standar prasarana permukiman terdiri dari :

- Jaringan jalan;
- Jaringan drainase;
- Jaringan air bersih dan air limbah/sanitasi;
- Persampahan;
- Jaringan Listrik dan
- Jaringan Telepon.

Berdasarkan data IKK outcome 1.d.5 pada Tahun 2022, jumlah unit rumah yang dibangun terfasilitasi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) sebanyak 2.443 Unit. Sedangkan jumlah unit rumah Kabupaten/Kota sebanyak 185.433 Unit. Untuk indikator kinerja persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dengan formulasi perhitungan jumlah unit

rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU dibagi jumlah unit rumah kabupaten/kota dikali 100.

➤ **persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak**

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU} \times 100\%}{\text{Jumlah unit rumah kabupaten/kota}} \\ &= \frac{2.443}{185.433} \times 100 \\ &= \mathbf{1,31 \%} \end{aligned}$$

2) Indikator kinerja utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berikutnya adalah **Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh**. Dari target indikator sebesar 79,30 diperoleh realisasi 51,73 persen dengan persentase capaian sebesar 65,23 persen. Realisasi capaian tersebut di dapat berdasarkan data pengurangan kumuh yang dituangkan ke dalam Berita Acara Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2022 Tingkat Kabupaten. Pada point 1 (satu) Berita Acara disepakati bahwa Luas kumuh awal berdasarkan SK Kumuh Bupati Nomor 454/SK-BUP/HK/2019 tentang Lokasi Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar 168,11 Ha. Setelah dilakukan Perhitungan Pengurangan Kumuh Tahun 2022 menjadi 81,14 Ha. Sehingga total luasan kumuh yang sudah tertangani sampai dengan Tahun 2022 seluas 86,97 Ha.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, bahwa Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Indikator kinerja ini diperoleh dari perhitungan luas kumuh yang ditangani dibagi luas wilayah kumuh dikali 100.

➤ **Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh**

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Luas Kumuh yang ditangani}}{\text{Luas wilayah kumuh}} \times 100\% \\ &= \frac{86,97}{168,11} \times 100 \\ &= \mathbf{51,73 \%} \end{aligned}$$

Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh, dengan persentase capaian sebesar 65,23 persen masuk dalam kategori cukup memuaskan. Tidak tercapainya realisasi terhadap target karena pada kondisi eksisting perhitungan awal luas kumuh yang tertangani terlalu tinggi, sedangkan sesuai Berita Acara Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2022, yang tertangani seluas 86,97 Ha dari total luas wilayah kumuh berdasarkan SK Kumuh Bupati Nomor 454/SK-BUP/HK/2019 tentang Lokasi Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu 168,11 Ha, sehingga sisa luasan kumuh yang masih harus ditangani masih ada seluas 81,14 Ha. Berdasarkan hal tersebut maka kemungkinan besar akan dilakukan **penyesuaian** terhadap perhitungan awal luas kumuh yang ditangani.

